

# **KEBIJAKAN FISKAL DALAM MEMPERKUAT INDUSTRI LOGISTIK NASIONAL DAN MEWUJUDKAN INDONESIA SEBAGAI POROS MARITIM DUNIA**

**KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.**

**06 Oktober 2015**

# PEMERINTAH → komplementer

Dalam hal diperlukan, secara ekonomi Pemerintah dapat berperan melalui campur tangan di bidang ekonomi dalam rangka mengalokasikan sumber daya ekonomi secara efisien untuk menciptakan **kesejahteraan rakyat**.

Campur tangan bisa dilakukan dengan cara :

- Melakukan regulasi/deregulasi
- Melalui APBN → sekitar 18 % PDB
  - Memberikan insentif melalui kemudahan perpajakan dan/atau alokasi belanja negara → subsidi
  - Melalui pembiayaan (memberikan PMN, penjaminan, dukungan)
  - Membentuk berbagai unit kerja untuk mendukung program tertentu (BUMN, BLU)



# Fungsi APBN → untuk campur tangan

(sebagai turunan fungsi Pemerintah)



## Ekspansif



## Stabilisasi



## Kontraktif



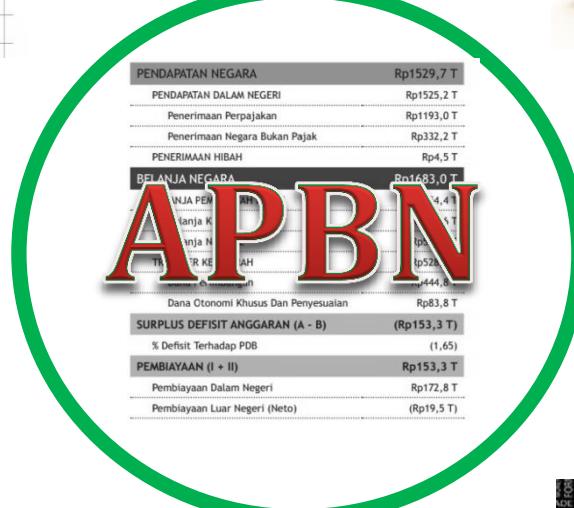
## Alokasi



Barang Publik:

- Jalan
- Jembatan
- Pelayanan
- Kesehatan
- Hankam
- Dll

Sistem Pasar  
Peradilan  
Lingkungan



## Distribusi

Pajak  
Progresif

→ Kegiatan  
*pro-poor*



Menuju APBN yang berkualitas dan *sustainable*.



KEMENTERIAN  
KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

# Arah Kebijakan Fiskal dalam Mendukung Kesejahteraan Rakyat

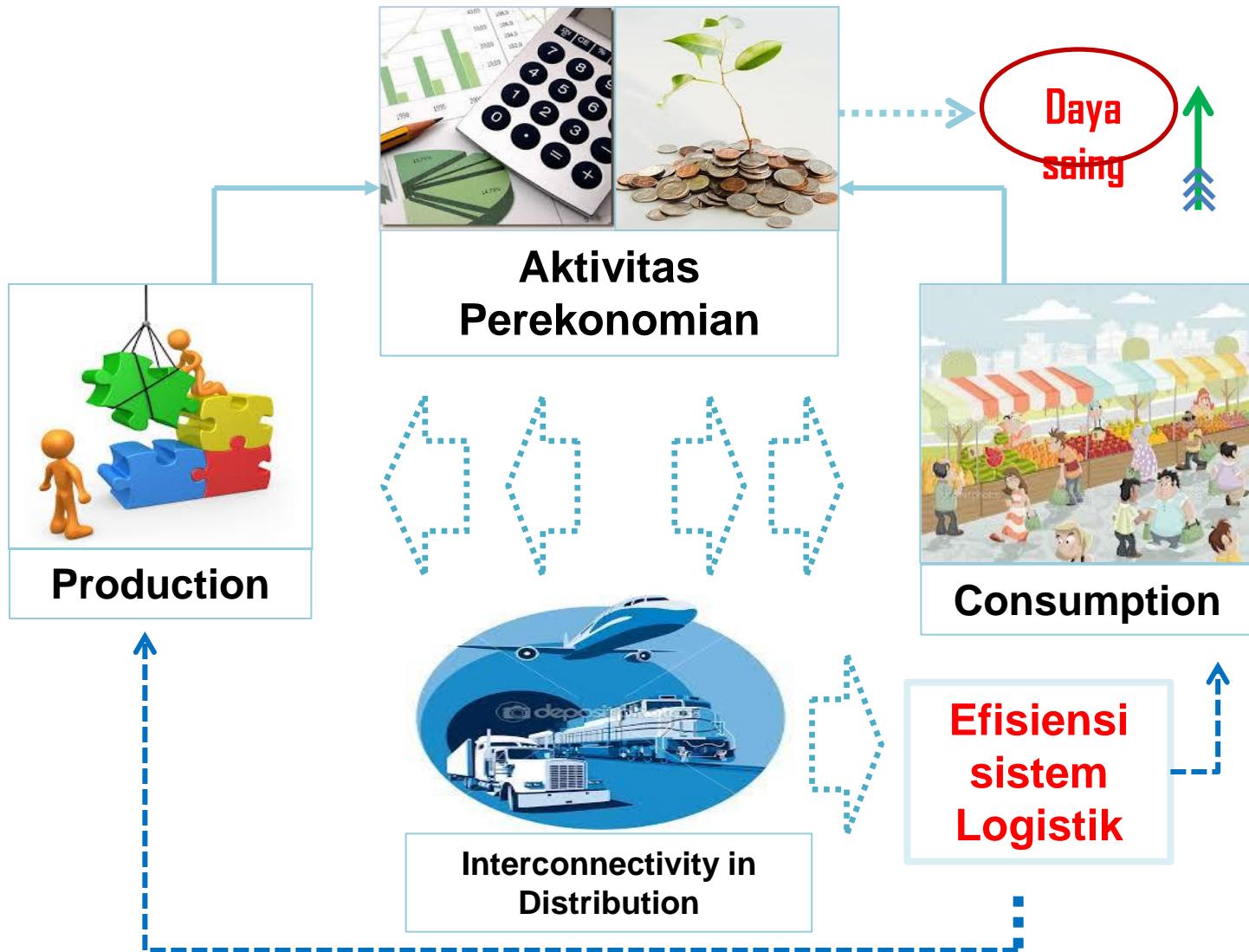
Kementerian Keuangan Republik Indonesia

# Kondisi Industri Logistik Indonesia

- Industri logistik : industri jasa yang berperan untuk menyampaikan barang dari tangan produsen ke tangan konsumen
- Biaya logistik tinggi menghambat daya saing
  - Logistik → omzet Rp1,8 triliun: lewat laut (1,04 miliar ton), kargo kereta api (25,5 juta ton), udara (1,34 juta ton)
  - Posisi Indonesia : daya saing (38 ; WEF) utk tahun 2013-2014, logistik (6 utk ASEAN)
  - Kontribusi biaya logistik thd PDB (Indonesia : 26 persen, sedangkan negara maju 7 persen)
  - Pertumbuhan industri logistik adalah 15 persen – 20 persen
  - Hambatan bisnis logistik : keterlambatan pengiriman, terfragmentasi sehingga lebih fokus pada biaya ekonomis, bukan pada kualitas dan jenis layanan, kurangnya infrastruktur, high cost economy, lambannya birokrasi, perlunya investasi yang besar, kurang tersedianya SDM yang profesional
- Ditentukan oleh ketersediaan infrastruktur, regulasi

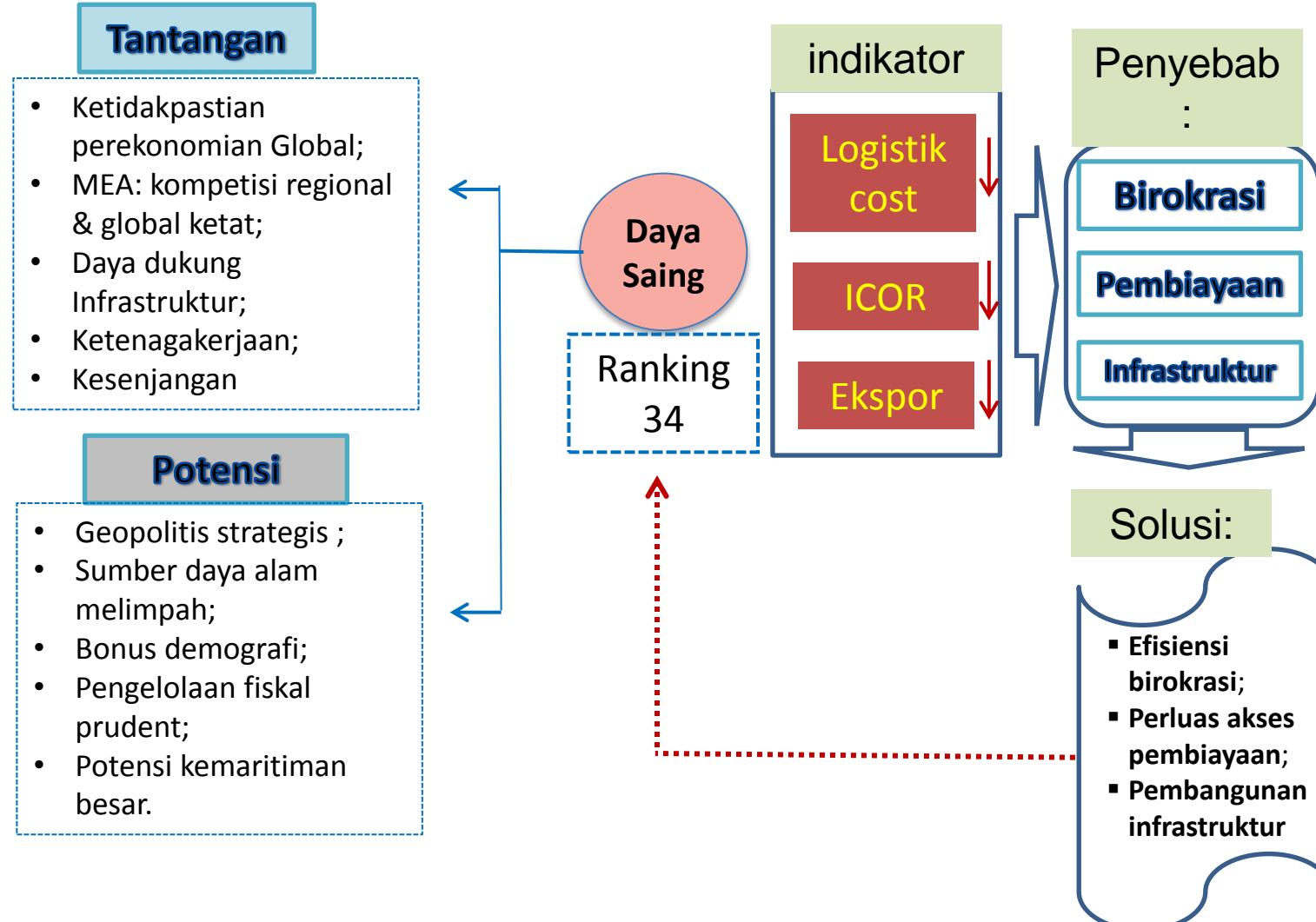


Logistik efisien → harga lebih rasional →  
kesejahteraan rakyat lebih tinggi





# Posisi Strategis Industri Logistik bagi peningkatan daya Saing (1)



# Posisi Strategis Industri Logistik bagi peningkatan daya Saing (2)



**Boost**

**Competitiveness**

Birokrasi dan Prosedur

Infrastruktur dan Konektivitas

Kualitas Pelayanan Teknis

Efisiensi Waktu  
(Dwelling dan Loading)

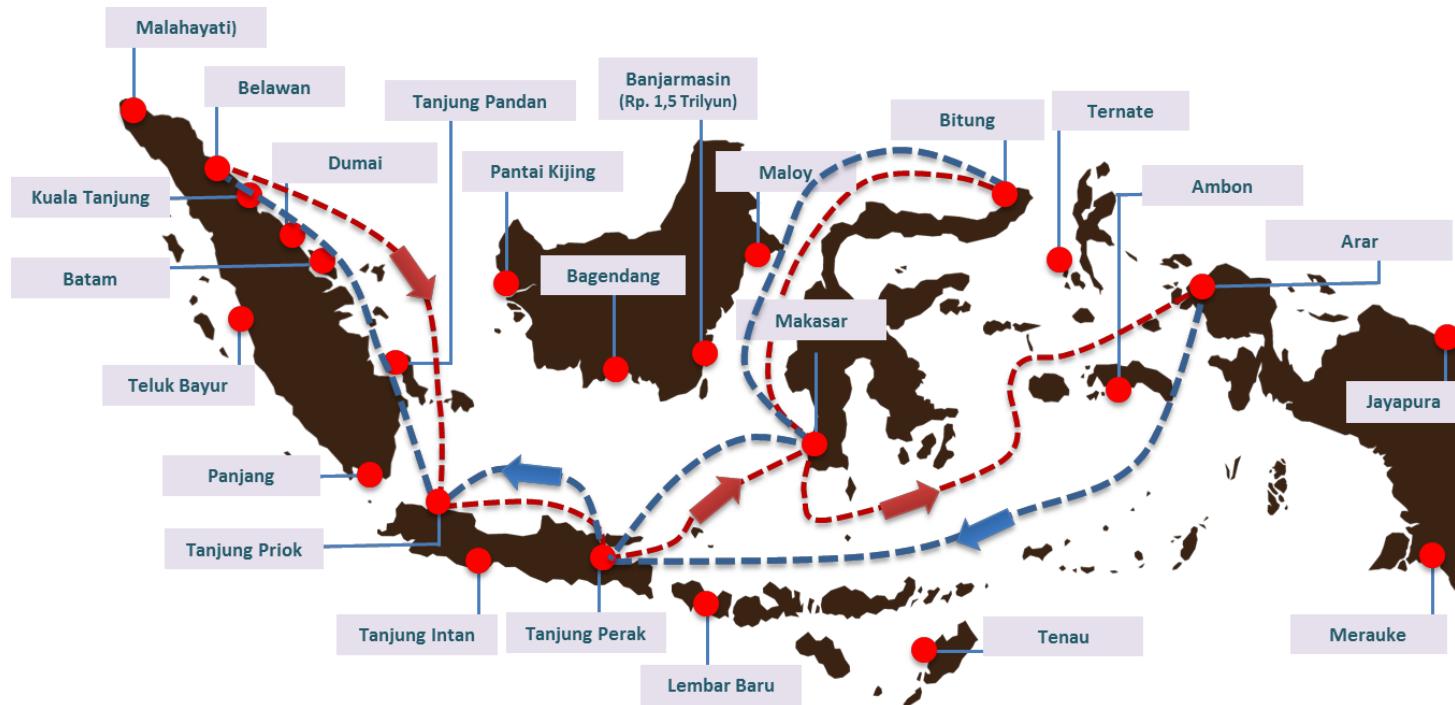
Efisiensi Biaya Transaksi  
dan Pengiriman Barang

Pengawasan Barang  
*in/out*

**Area untuk  
di-improve  
melalui  
Kebijakan**

**Mendorong  
Kinerja  
Efisiensi dan  
Daya saing**

# Tol Laut Sebagai Salah Satu Solusi Peningkatan Sistem Logistik

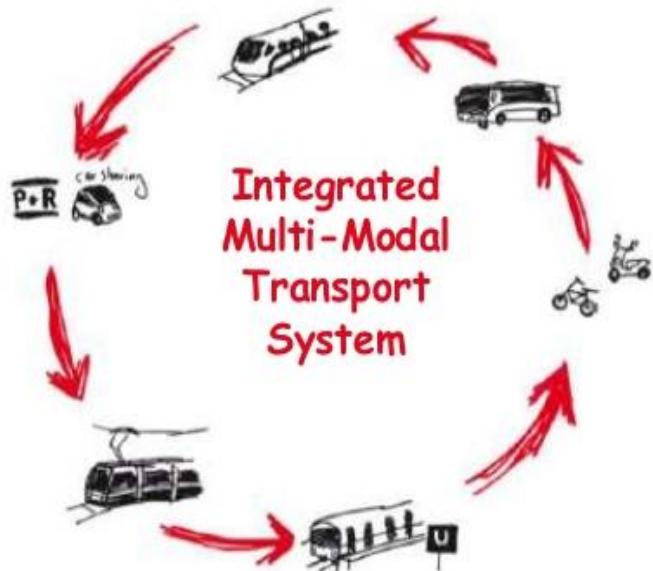


Development of sea highway is done through :

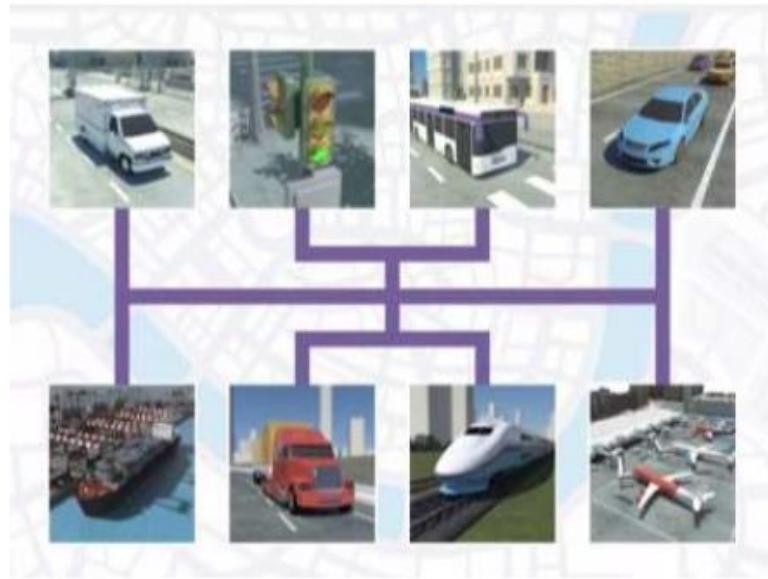
1. Development of a national marine transportation system to improve accessibility of regional and national economic development
2. Increased capacity of port and the quality of port services
3. Increased safety of shipping
4. Increased accessibility and domestic connectivity through the development of port and other supporting infrastructure
5. Increased production capacity of shipbuilding industry



Tol laut harus didukung dengan moda transportasi yang terkoneksi, sehingga biaya logistik menjadi efisien...



## Integrated Multi-Modal Transport



## 'Smart' and 'Connected' Transport

# Strategi & Sasaran Peningkatan Sistem Konektivitas Nasional 2016

...untuk meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana transportasi dan keterpaduan sistem transportasi multimoda dan antarmoda



- Peningkatan konektivitas intrawilayah dan antarwilayah merupakan hal yang sangat diperlukan dengan pertimbangan kondisi Indonesia sebagai negara kepulauan untuk mengurangi biaya distribusi barang dan jasa serta transportasi
- Percepatan pembangunan sarana transportasi multimoda diperlukan guna mewujudkan keseimbangan pertumbuhan pembangunan yang mengurangi kesenjangan ekonomi dan spasial

Sumber: RKP 2016

No.	Program Peningkatan Konektivitas Nasional	Target 2015-2019	Target 2016
1	Peningkatan kemantapan jalan nasional	98%	89%
2	Pembangunan jalan nasional	2.650 km	988,3 km
3	Pembangunan jalan bebas hambatan	1.000 km	207 km
4	Penyediaan kapal penyeberangan lalu-lintas perintis	50 unit	29 unit
5	Peningkatan kapasitas pelabuhan utama pendukung tol laut	24 pelabuhan strategis	24 pelabuhan strategis
6	Terbangunnya dermaga sungai dan danau	120 lokasi	2 lokasi
7	Pembangunan & pengembangan bandara	15 bandara baru & pengembangan 9 bandara kargo	pengembangan 15 bandara baru & 9 bandara kargo
8	Terbangunnya jalur KA	4.471 km	619,49km

# Infrastructure Development Framework 2015-2019

...infrastruktur menjadi program prioritas bagi pemerintah saat ini



## Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)

- ✓ Infrastruktur yang memadai
- ✓ Pendapatan per kapita sebesar USD 14.000/thn pada tahun 2025
  - ✓ Tingkat pengangguran < 5%
  - ✓ Tingkat kemiskinan < 5%
- ✓ Peningkatan Human Development Index dan Gender Development Index

### Masalah

1. Kondisi jalan yang buruk di daerah terpencil
2. Terbatasnya perkembangan rel kereta
3. Pelabuhan yang kurang efisien
4. Rasio elektrifikasi yang rendah
5. Krisis air bersih

### Tantangan

1. Geopolitik
2. Geoekonomi
3. Bonus Demografi
4. Agenda 2015
5. Perubahan Iklim

### Isu

1. Meningkatkan konektivitas
2. **Menurunkan biaya logistik**
3. Meningkatkan daya saing
4. Mendukung investasi
5. Meningkatkan kapasitas produksi

### Sasaran RPJMN 2015 -2019

1. **Rasio elektrifikasi 100%**
2. **Pipa gas rumah tangga 192.000(SR)**
3. **Akses air bersih 100%**
4. **Sanitasi 100%**
5. **Jalan raya yang layak 100%**
6. **Menurunkan biaya logistik 20% dari GDP**
7. **Pasar tranportasi umum 32%**
8. **Akses telekomunikasi dan internet 100%**
9. **Indeks e-government 3,4 (skala 4.0)**
10. **Sistem irigasi dengan memanfaatkan tepian air 20%**



# Pembangunan infrastruktur yang progresif membutuhkan pembiayaan

...RPJMN memaparkan prioritas pembangunan infrastruktur

## RENCANA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR 2015 – 2019



2.650 km	Jalan Baru
1.000 km	Jalan Tol
46.770 km	Perbaikan Jalan
29	Bus Rapid Transport (BRT)



24	Pelabuhan Baru
115	Pengembangan Pelabuhan
26	Cargo Vessel Pioneer



15	Bandara Baru
40	Pengembangan Bandara
20	Bandara Perintis



2.159 km	Rel Kereta nasional
1.099 km	Kereta Dalam Kota

## KEBUTUHAN BIAYA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR 2015 – 2019

### APBN (Pusat dan Daerah)

- **Dana Alokasi Khusus dan Dana Desa**
- **Khususnya untuk mendukung pendanaan pembangunan infrastruktur di bidang:**

*Ketahanan pangan, Maritim, dan Konektifitas*

### BUMN dan Swasta

- **Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk BUMN**
- **Fokus pembangunan** untuk proyek komersial dan/atau proyek yang kompleks
- **Pengembangan infrastruktur jangka menengah**, al. pembangkit listrik dan jalan tol

### Public Private Partnership (PPP)

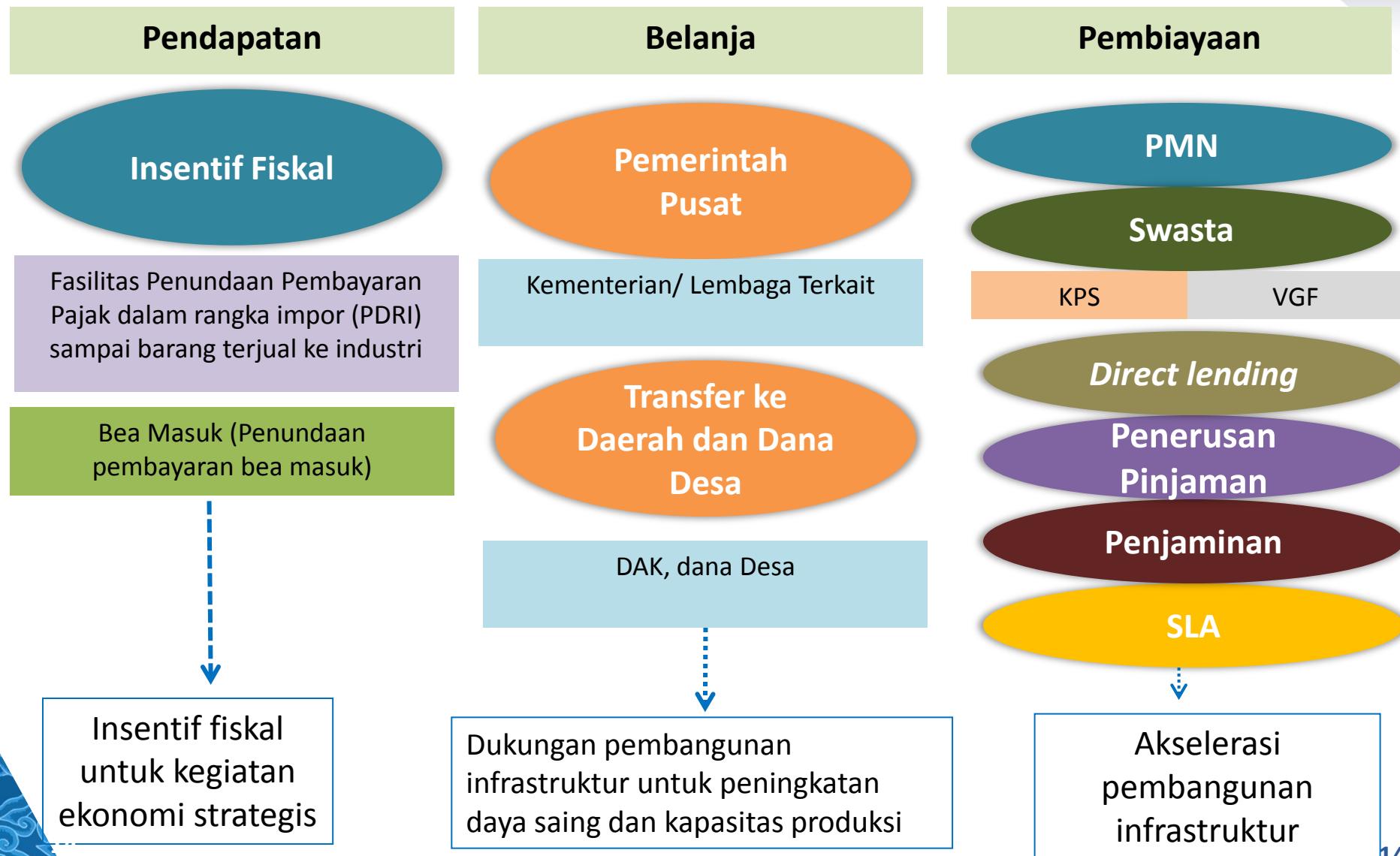
- **Pembiayaan proyek infrastruktur tertentu** dan dioperasikan melalui kerjasama antara pemerintah dan sektor publik
- **Dukungan Pemerintah untuk PPP :**  
Land Fund, Project Development, Penjaminan pemerintah, Tambahan suntikan modal, Viability Gap Fund (VGF), Infrastructure Fund, Availability Payment (AP).

## APBN DAN APBD SEBAGAI SUMBER PENDANAAN UTAMA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

porsi pembiayaan dari BUMN dan sektor privat terhadap total pembiayaan menunjukkan tren penurunan sebelum periode tahun 2015



# Skema pendanaan untuk mendukung penguatan sistem logistik nasional melalui APBN





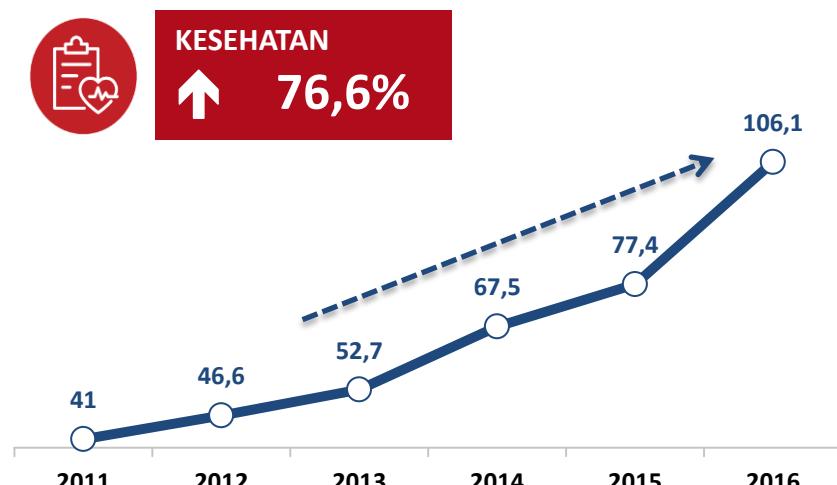
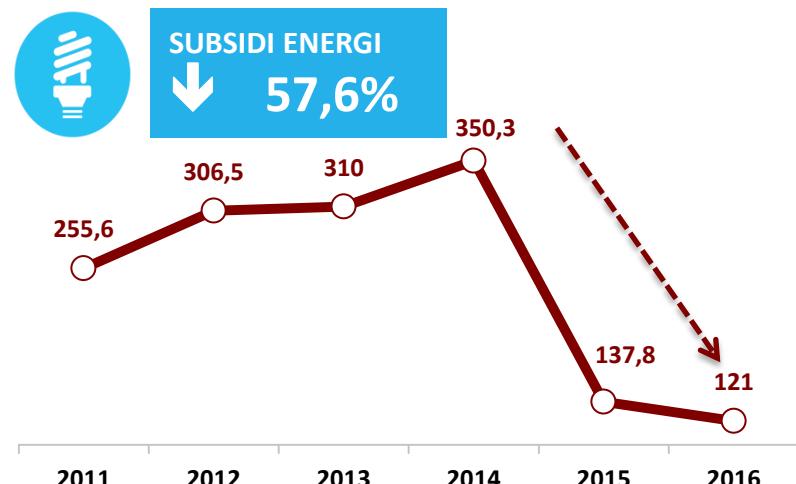
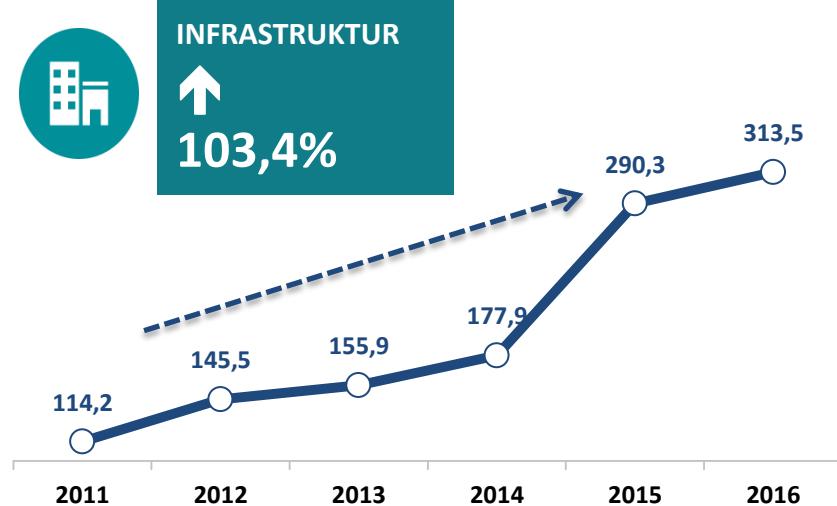
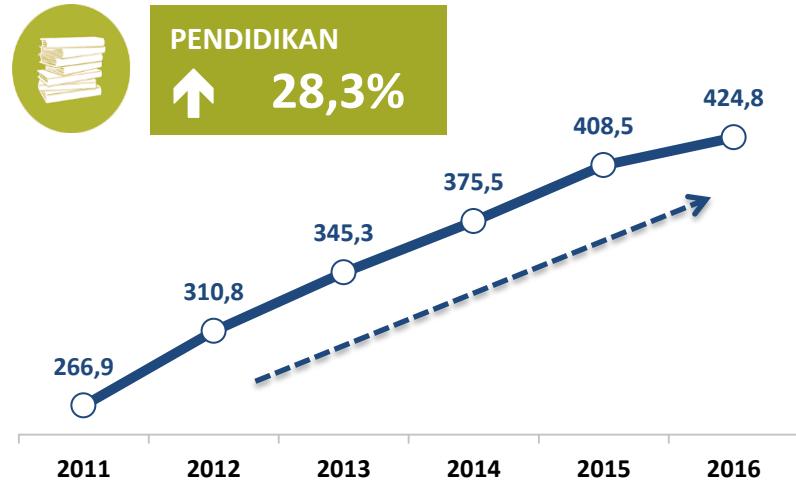
# Reformasi anggaran telah dimulai melalui realokasi belanja

...untuk pertama kalinya, anggaran pembangunan infrastruktur pada 2015 lebih tinggi dari subsidi energi, dan akan berlanjut

Rata-rata belanja produktif pada tahun 2015-2016 naik signifikan dibandingkan dengan 2011-

2014

2015: APBNP, 2016: RAPBN





# Skema Pembiayaan

APBN

- Belanja K/L
- Dana Alokasi Khusus dan Dana Desa
- Khususnya untuk mendukung pendanaan pembangunan infrastruktur di bidang:
  - Ketahanan pangan: bendungan, sistem irigasi, dll.
  - Maritim: pelabuhan, galangan kapal.
  - Konektifitas dalam dan luar kota: jalan desa, transportasi umum, dll

BUMN dan  
Sektor  
Privat

- Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk BUMN – Dengan mekanisme *leveraging*, suntikan modal dapat ditambah maka lebih banyak proyek infrastruktur yang dapat didanai
- Key focus areas:
  - Proyek komersial dan/atau proyek yang kompleks
  - Pengembangan infrastruktur maritim
  - Transportasi dan konektivitas
  - Ketahanan pangan
- Pengembangan infrastruktur jangka menengah, diantaranya: pembangkit listrik dan jalan tol

Public  
Private  
Partnership  
(PPP)

- *Certain infrastructure projects to be funded and operated through a partnership of Indonesia government and private sector companies*
- **Dukungan pemerintah untuk PPP :**
  - **Proses akuisisi lahan** - land capping, revolving, & acquisition funds
  - **Project Development** melalui PT Sarana Multi Infrastructure (PT SMI)
  - **Penjaminan pemerintah** untuk proyek infrastruktur melalui PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII)
  - **Tambahan suntikan modal** untuk PT SMI dan PT PII
  - **Viability Gap Fund (VGF)** for PPP projects with near-term financial constraints
  - **Infrastructure Fund** to offer long term financing for infrastructure projects
  - **Availability Payment (AP).**
- **Projects Ready for Auction under PPP Scheme:**
  - **Toll roads projects** such as Balikpapan-Samarinda, Manado-Bitung
  - **Railway projects** such as Halim-Soetta Airport Express Railway
  - **Water supply** such as West Semarang water supply project

# Kebijakan Skema Pembiayaan Infrastruktur

Operasi dan Pemeliharaan

Konstruksi

Reguler \*

## Kelayakan Proyek

1

**Tidak Layak Secara Ekonomi dan Tidak Layak Secara Finansial**

2

Layak Secara Ekonomi tetapi Tidak Layak Secara Finansial

3

**Layak Secara Ekonomi dan Finansial Marjinal**

4

**Layak Secara Ekonomi dan Finansial**

5

**Layak Secara Ekonomi tetapi Tidak Layak Secara Finansial**

## Skema Pembiayaan

Pemerintah

Pemerintah

Swasta

Pemerintah

Swasta

Pemerintah Swasta

Swasta

Swasta

BUMN

BUMN

APBN

## Hybrid Financing (KPS)

PPP Dengan Dukungan Pemerintah (VGF) atau Creative Financing lainnya seperti PFI, PBAS, Bank Infrastruktur, Bank Tanah, dll)

**PPP Reguler**

**Penugasan BUMN**

\*\* Lebih diutamakan untuk wilayah barat dan perkotaan

Creative Financing \*\*



# Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II untuk Mendorong Iklim Investasi

Kebijakan	Kondisi Sebelumnya
Pengurusan izin investasi di kawasan industri menjadi hanya 3 jam	Pengurusan ijin investasi untuk badan usaha membutuhkan 8 hari, ditambah dengan perizinan lain memerlukan 526 hari
Pemangkasan tahap perijinan di Kemen LHK dari 14 tahap menjadi 6 tahap	Pengurusan izin pinjaman pakai dan izin pelepasan kawasan hutan bisa memakan waktu 2-4 tahun
Pengurusan tax allowance diselesaikan maksimal 25 hari	Pada pertengahan 2015, pengurusan tax allowance dijanjikan BKPM maksimal 28 hari
Pengurusan tax holiday diselesaikan maksimal 45 hari	Beberapa perusahaan yang telah mengajukan tax holiday sejak 2013 hingga saat ini belum mendapatkan kepastian persetujuan
Penerbitan PP 69 tahun 2015 yang membebaskan impor alat angkutan kereta api, galangan kapal, pesawat, termasuk suku cadang dari PPN	Sebelumnya pemerintah melakukan pemungutan PPN sehingga biaya produksi industri alat transportasi dalam negeri naik
Insentif pengurangan pajak bunga deposito terutama untuk eksportir yang belum memiliki kewajiban laporan DHE kepada BI	DHE sebagian besar tidak disimpan di perbankan Indonesia, tetapi di negara lain.



# Kebijakan revisi Tax Holiday terkini

...untuk mendorong investasi

## Revisi Fasilitas Pengurangan Pajak Pph Badan

### No. 130/2011 & No. 192/2014

**Minimal Nilai Investasi:** Rp. 1 Triliun

**Jangka Waktu Fasilitas:** 5 - 10 tahun

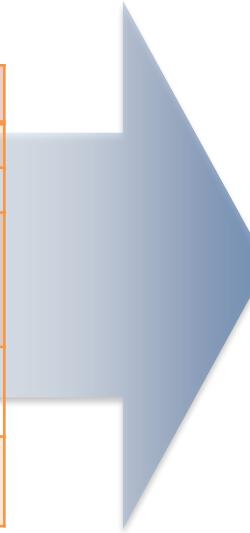
**Besaran Fasilitas :**

Periode Awal: Maks. 100%

Periode Perpanjangan: Maks. 50%

Industri yang berhak mengajukan permohonan sebanyak **5 sektor**

Diberlakukan untuk perusahaan yang memiliki ketentuan **tax sparing** di negara domisili



### No. 159/2015

**Minimal Nilai Investasi:** Rp. 500 Miliar

**Jangka Waktu Fasilitas:** 5 - 20 tahun

**Besaran Fasilitas :**

10% - 100% yang berlaku sama setiap tahunnya selama jangka waktu yang disetujui

Industri yang berhak mengajukan permohonan **9 sektor**

**Tidak diberlakukan** tax sparing

## FASILITAS TAX HOLIDAY

1. Revisi regulasi tax holiday ditujukan untuk meningkatkan yang memiliki nilai strategis bagi perekonomian dan eksternalitas yang tinggi.
2. Nilai investasi lebih fleksibel (dimulai dari Rp. 500 Miliar).
3. Insentif pemotongan pajak yang diberikan lebih besar (maksimal 100%).
4. Jangka waktu fasilitas yang lebih lama (maksimal 20 tahun).
5. Memperluas sektor yang berhak mendapatkan fasilitas tax holiday (dari 5 menjadi 9 sektor industri).

**Tax holiday ditawarkan bagi pelaku industri di sektor:**

1. Industri logam hulu;
2. Industri pengilangan minyak bumi;
3. Industri kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi dan gas alam;
4. Industri permesinan yang menhasilkan mesin industri;
5. Industri pengolahan berbasis hasil pertanian, perikanan, dan kehutanan;
6. Industri telekomunikasi, informasi, dan komunikasi;
7. Industri transportasi kelautan;
8. Industri pengolahan yang merupakan industri utama di KEK;
9. Infrastruktur ekonomi selain yang menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)



## CAPAIAN 2014 DAN PERKEMBANGAN TAHUN 2015 TERKAIT INDUSTRI LOGISTIK DAN KEMARITIMAN



# Kinerja Anggaran dan Capaian Output K/L terkait Industri logistik dan Kemaritiman, 2014



No.	K/L	APBNP	Realisasi	% thd APBNP
	<b>Bidang Industri Logistik</b>	<b>77.451,6</b>	<b>75.100,1</b>	<b>97,0</b>
1	Kemen PU	74.522,2	72.794,1	97,7
2	BKPM	574,2	527,1	91,8
3	Kemendag	2.355,2	1.778,9	75,5
	<b>Bidang Kemaritiman</b>	<b>57.601,0</b>	<b>43.219,0</b>	<b>75,0</b>
1	KKP	5.748,7	5.865,7	102,0
2	Kemenparekraf	1.507,7	1.275,8	84,6
3	Kemenhub	36.003,2	28.722,8	79,8
4	Kemen ESDM	14.341,5	7.354,7	51,3



# Kinerja Anggaran dan Capaian Output K/L terkait Industri logistik dan Kemaritiman, 2014



K/L dan sasaran	Capaian 2014	K/L dan sasaran	Capaian 2014
<b>I. Industri Logistik</b>		<b>II. Kemaritiman</b>	
<b>1. Kementerian Pekerjaan Umum</b>		<b>1. Kementerian ESDM</b>	
a. Peningkatan Kemantapan Jalan	94%	a. Pembangunan jaringan distribusi	9.542,6 KMS
b. Pembangunan Jalan Nasional	997 km	b. Pembangunan gardu distribusi	180,9 MVA
c. Irigasi dan Irigasi air tanah	79.277 ha	c. Instalasi listrik gratis kepada nelayan dan rakyat tidak mampu	118.460 RTS
d. Waduk yang selesai dibangun	7	d. Recovery penambangan terkait konservasi bahan galian pada kegiatan usaha pertambangan	90,70%
e. Pembangunan prasarana pengendali banjir	185 km		
f. Embung/situ yang dibangun	511		
g. Peningkatan jumlah pelayanan air minum	643 kawasan		
h. Rusunawa	25 twinblock		
<b>2. Kementerian Perdagangan</b>		<b>2. Kementerian Perhubungan</b>	
a. Total ekspor nasional	USD 176,3 miliar	a. Rute perintis udara yang terlayani	164
b. Pelayanan perizinan ekspor-impor yang dapat dilayani secara online	96 jenis	b. Bandar udara yang dikembangkan di daerah perbatasan dan rawan	9
c. Rata-rata waktu penyelesaian perizinan ekspor impor	3,13 hari	c. Bandar udara baru yang dibangun	2
d. Rasio penggunaan produk dalam negeri terhadap pengeluaran konsumsi rumah tangga	97,4%	d. Lintas penyeberangan perintis	178
e. Rata-rata koefisien variasi harga bahan pokok utama	2,7%	e. Penumpang angkutan umum pada pelayanan angkutan lebaran	8.870.525 pnp/tahun
<b>3. BKPM</b>		f. Rute lintas perintis laut	84
a. Jumlah Persyaratan Prosedur Penanaman Modal yang menjadi kewenagan BKPM (2013 dan 2014)	14	g. Kapal laut perintis	54
b. Jumlah Investor yang berminat masuk KEK	5	h. Pelabuhan laut yang dibangun	289
c. Jumlah fasilitasi persiapan transaksi proyek KPS infrastruktur	Fasilitasi 11 proyek	i. Jalur KA baru yang dibangun termasuk jalur ganda	106 km
d. Jumlah kegiatan pemasaran proyek KPS infrastruktur	7 kegiatan	j. Pengadaan lokomotif, KRDI, KRDE, KRL, Tram, Railbus	12 unit
<b>INDONESIA MERDEKA 70<sup>th</sup> AYO KERJA</b>		<b>3. Kementerian Kelautan dan Perikanan</b>	
		a. Produksi perikanan budidaya	14,52 juta ton
		b. Volume Produk Olahan Hasil Perikanan	5,21 juta ton
		c. Volume Produksi perikanan tangkap	6,2 juta ton
		d. Produksi garam yang dihasilkan	2,5 juta ton
<b>4. Kementerian Pariwisata dan Ekraf</b>		<b>4. Kementerian Pariwisata dan Ekraf</b>	
		a. Perolehan devisa yang diperoleh dari kunjungan wisman	USD 11,17
		b. Jumlah wisatawan mancanegara	9,44 juta
		c. Jumlah perjalanan wisatawan nusantara	251,20 juta
		d. Kontribusi pariwisata terhadap penyerapan tenaga kerja nasional	9%



# Kinerja Anggaran dan Capaian Output K/L terkait Industri logistik dan Kemaritiman, 2015



No.	KODE BA	K/L	APBNP	Real s.d 31 Agus	% thd APBNP
		<b>BIDANG INDUSTRI LOGISTIK</b>	<b>127.262,4</b>	<b>35.786,1</b>	<b>28,1</b>
1.	065	BKPM	635,9	298,1	46,9
2.	033	KEMEN PU PERA	118.546,1	33.496,4	28,3
3.	019	KEMENPERIN	4.548,3	1.160,9	25,5
4.	090	KEMENDAG	3.532,1	830,7	23,5
		<b>BIDANG KEMARITIMAN</b>	<b>93.038,2</b>	<b>15.435,6</b>	<b>16,6</b>
1.	022	KEMENHUB	64.954,1	9.837,5	15,1
2.	020	KEMEN ESDM	15.070,5	2.242,6	14,9
3.	032	KKP	10.597,8	2.988,8	28,2
4.	040	KEMEN PARIWISATA	2.415,8	366,7	15,2





# Kinerja Anggaran dan Capaian Output K/L terkait Industri logistik dan Kemaritiman, 2015



K/L dan sasaran	Target 2015
<b>1. Kementerian PU dan PR</b>	
a. Jalan yang ditingkatkan	1846 km
b. Jalan yang dibangun	479 km
c. Jembatan yang dibangun	7155 m
d. Jalan bebas hambatan yang dibangun	33 km
e. Jumlah konstruksi embung dan bangunan penampung air lainnya yang selesai dilaksanakan dan jumlah konstruksi bendung irigasi	309 buah
f. Panjang normalisasi sungai dan pembuatan tanggul yang dibangun/ditingkatkan	126,31 km
g. Jumlah rumah tangga berpenghasilan rendah yang menghuni rumah susun	37.400 unit
h. Jumlah rumah tangga yang menghuni rumah khusus	10.320 unit
i. Jumlah Rumah tangga berpenghasilan rendah yang difasilitasi bantuan peningkatan kualitas rumah swadaya	50.000 unit
<b>2. Kementerian Perdagangan</b>	
a. Jumlah UKM yang bermitra dengan retail modern	150
b. Persentase Pertumbuhan Ekspor Produk Olahan Pertanian dan Kehutanan	5,5%
c. Pertumbuhan ekspor non migas (%)	8,0%
d. Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai ketentuan	60,0%
<b>3. Kementerian Perindustrian</b>	
a. Fasilitasi Pembangunan Bufferstock Bahan Baku Kapas di Jawa Barat dan Bufferstock Kulit di Jawa Timur	2 lokasi
b. Pengembangan industri petrokimia (komoditi)	3
c. Terfasilitasinya Pengembangan Industri Pangan (komoditi)	4
d. Terevitalisasinya industri galangan kapal di 9 lokasi (Pembangunan/Renovasi, Bantuan Alat, Peningkatan SDM bersertifikasi)	9
e. Jumlah IKM yang dikembangkan produknya (IKM)	36
<b>4. BKPM</b>	
a. Perbaikan kemudahan memulai berusaha	9 prosedur
b. Jumlah minat investasi	6.000
c. Jumlah perizinan dan nonperizinan yang diterbitkan	11.500
d. Penyebaran realisasi investasi di luar jawa	45,60%

K/L dan sasaran	Target 2015
<b>1. Kementerian ESDM</b>	
a. Kapasitas terpasang kilang LPG (juta ton)	4,6
b. Rumah tangga tersambung gas kota (SR)	8.000
c. Fasilitasi penyelesaian pembangunan pembangkit 35.000 MW	3.782 MW
d. Rasio Elektrifikasi	87,35%
e. Jumlah kapasitas terpasang PLT Bioenergi	1.892 MW
f. Jumlah kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi	1.438,5 MW
g. Jumlah kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Air	5.339 MW
h. Jumlah kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Surya	76,9 MW
i. Jumlah kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Angin	5,8 MW
<b>2. Kementerian Kelautan dan Perikanan</b>	
a. Produksi perikanan tangkap	6,3 juta ton
b. Produksi perikanan budidaya	17,9 juta ton
c. Volume produksi olahan hasil perikanan	5,6 juta ton
d. Nilai tukar pembudidaya ikan (NTPi)	102 NTPi
<b>3. Kementerian Perhubungan</b>	
a. Panjang jalur kereta api yang dibangun	186,99 Km sp
b. Jumlah unit jembatan/underpass/flyover KA yang dibangun	110 Unit
c. Jumlah BRT	1.050 Unit
d. Jumlah lokasi pembangunan jembatan timbang	2 Unit
e. Jumlah paket pembangunan dermaga sungai	13 Lokasi
f. Jumlah pembangunan kapal perintis penumpang dan barang	93 Unit
g. Jumlah pembangunan sarana bantu navigasi pelayaran	196 Unit
<b>4. Kementerian Pariwisata</b>	
a. Jumlah fasilitasi peningkatan destinasi wisata, budaya, alam dan buatan	15
b. Kontribusi investasi sektor pariwisata terhadap total investasi nasional	3,6 %
c. Jumlah tenaga kerja langsung, tidak langsung, dan ikutan sektor	11,3 juta orang
d. Jumlah wisatawan mancanegara ke Indonesia	10 juta
e. Jumlah perjalanan wisatawan nusantara (juta perjalanan)	255
f. Jumlah tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi	17.500 orang



## RENCANA PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2016 TERKAIT INDUSTRI LOGISTIK DAN KEMARITIMAN



# Target Outcome Pembangunan Infrastruktur RPJMN 2015-2019



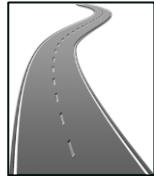
Indikator	Tahun 2014	Target Tahun 2019	Indikator	Tahun 2014	Target Tahun 2019
<b>Kedaulatan Energi</b>					
• Rasio Elektrifikasi (%)	81,5	100 (96,6*)	• Kemantapan Jalan Nasional	94%	100 %
• Konsumsi listrik per kapita (kWh)**	843	1200	• Biaya Logistik	23,5%	19,2 %
• Pembangunan FSRU (unit)	2	3	• Pangsa Angkutan Umum	23%	32%
• Jaringan pipa gas (km)	11.960	17.690	• Kab/Kota yang dijangkau pitalebar	72%	100%
• Pembangunan SPBG (unit)	40	118			
• Jaringan gas kota (sambungan rumah)	102 ribu	1 jt			
• Pembangunan kilang baru (unit)	-	2			
<b>Infrastruktur Dasar</b>					
• Akses Air Minum layak	68,5%	100%	• Kapasitas Air Baku	51.4 M3/Detik	118.6M/Detik
• Akses Sanitasi Layak	60,5%	100%	• Storage Per Kapita	62.3 M3/Kapita	78.36 M3/Kapita
• Kawasan Kumuh Perkotaan	37.407 Ha	0 Ha	• Irrigasi yang diairi waduk	11%	20%
• Backlog Kebutuhan Rumah	13,5 Juta	6,8 Juta	• Jaringan Irrigasi Permukaan	7.145 Juta Ha	7.914 Juta Ha

\*) Kemampuan Kementerian ESDM

\*\*) Sebagai perbandingan konsumsi listrik per kapita saat ini: Vietnam 1.000 kWh, Thailand 2.200 kWh, Malaysia 4.200 kWh, Jepang 7.800 kWh, USA 13.200kWh



# Rencana Pembangunan Infrastruktur terkait Industri Logistik dan Kemaritiman, RPJMN 2015-2019



- Jalan baru **2.650 Km**
- Jalan tol **1.000 Km**
- Pemeliharaan jalan **46.770 Km**
- Pembangunan **15 Bandara baru**
- Pengadaan **20 Pesawat Perintis**
- Pengembangan Bandara untuk pelayanan **Cargo Udara di 6 Lokasi**
- Pembangunan **24 Pelabuhan baru**
- Pengadaan **26 Kapal Barang Perintis**
- Pengadaan **2 Kapal Ternak**
- Pengadaan **500 unit kapal Rakyat**



- ▶ Pembangunan Jalur **KA 3.258 km** di Jawa, Sumatera, Sulawesi dan Kalimantan terdiri dari:
  - KA Antar kota 2.159 km
  - KA Perkotaan 1.099 km



- ▶ Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan di **60 lokasi**
- ▶ Pengadaan **kapal penyeberangan (terutama perintis) sebanyak 50 unit**



- ▶ Pembangunan **BRT di 29 kota**
- ▶ Pembangunan angkutan massal cepat di kawasan perkotaan (6 Kota metropolitan, 17 Kota besar)





# RANCANGAN TEMA RKP 2016



## NORMA PEMBANGUNAN KABINET KERJA

- 1) Membangun untuk manusia dan masyarakat;
- 2) Upaya peningkatan kesejahteraan, kemakmuran, produktivitas tidak boleh menciptakan ketimpangan yang makin melebar. Perhatian khusus diberikan kepada peningkatan produktivitas rakyat lapisan menengah bawah, tanpa menghalangi, menghambat, mengecilkan dan mengurangi keleluasaan pelaku-pelaku besar untuk terus menjadi agen pertumbuhan;
- 3) Aktivitas pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan keseimbangan ekosistem

## 3 DIMENSI PEMBANGUNAN

### DIMENSI PEMBANGUNAN MANUSIA

- Pendidikan
- Kesehatan
- Perumahan
- Mental / Karakter

### DIMENSI PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN

- Kedaulatan Pangan
- Kedaulatan Energi & Ketenagalistrikan
- Kemaritiman
- Pariwisata dan Industri

### DIMENSI PEMERATAAN & KEWILAYAHAN

- Antarkelompok Pendapatan
- Antarwilayah: (1) Desa, (2) Wilayah Pinggiran, (3) Luar Jawa, (4) Kawasan Timur

## KONDISI PERLU

Kepastian dan Penegakan Hukum

Keamanan dan Ketertiban

Politik & Demokrasi

Tata Kelola & RB

## QUICK WINS DAN PROGRAM LANJUTAN LAINNYA

RKP 2015

MELANJUTKAN REFORMASI BAGI PERCEPATAN PEMBANGUNAN EKONOMI YANG BERKEADILAN

RKP 2016

**MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR UNTUK MELETAKKAN FONDASI PEMBANGUNAN YANG BERKUALITAS**

RKP 2017

Ditetulkan dalam proses penyusunan RKP 2017

RKP 2018

Ditetulkan dalam proses penyusunan RKP 2018

RKP 2019

Ditetulkan dalam proses penyusunan RKP 2019



# ANGGARAN INFRASTRUKTUR TAHUN 2016

(triliun rupiah)



## Sasaran:

### 1. Infrastruktur energi

- a. Rasio elektrifikasi 90,15%.
- b. Pembangunan jaringan gas kota di 36 lokasi dan 121.000 rumah tangga yang tersambung gas kota;
- c. Produksi biofuel, biogas, dan uap panas bumi masing-masing sebesar 6,48 juta KL, 22.995 ribu m<sup>3</sup>, dan 83,05 juta ton;
- d. Kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi, Air, Surya, dan Angin masing-masing sebesar 1.712,5 MW, 5.534 MW, 92,1 MW, dan 11,2 MW

### 2. Perumahan, Air Minum dan Sanitasi

- a. Infrastruktur SPAM di kawasan nelayan 20.000 Sambungan Rumah (SR) & di kawasan rawan air/perbatasan/pulau terluar 105.280 SR

### 3. Keterhubungan antar Wilayah

- a. Pembangunan jalan 375,9 km dan jembatan 6.283,9 m
- b. Pemeliharaan jalan 43.506 km dan jembatan 338.690,9 m
- c. Pembangunan jalur kereta api 110,9 km sp, Jembatan/*underpass/flyover* KA 27 unit, BRT 530 unit,
- d. Pembangunan bandara di 11 lokasi;
- e. Pengembangan bandara di 26 lokasi daerah perbatasan dan 57 lokasi rawan bencana

### 4. Ekonomi Maritim dan Kelautan

- a. Pembangunan 94 unit kapal perintis penumpang dan barang; 96 trayek perintis dan 22 kapal PSO;
- b. Produksi perikanan tangkap sebanyak 6,45 juta ton;
- c. Produksi perikanan budidaya sebanyak 8,35 juta ton ikan, 11,11 juta ton rumput laut, dan 1,9 miliar ekor ikan hias



## Kebijakan Penguatan Industri Logistik Nasional, 2016



1. Mempercepat pembangunan Sistem Transportasi Multimoda, transportasi yang mendorong penguatan industri nasional untuk mendukung sistem logistik nasional.
2. Meningkatkan kerjasama pemerintah pusat dan daerah dengan dunia usaha, termasuk BUMN untuk memperlancar distribusi logistik barang, jasa, dan informasi;
3. meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana perdagangan yang mendukung pengembangan sistem logistik nasional.
4. Peningkatan efisiensi sistem logistik dan distribusi dalam mendukung penguatan stabilisasi harga dan pasokan pangan.



# Kebijakan Bidang Kemaritiman Tahun 2016



1. Penyelesaian tata batas dan batas landas kontinen di luar 200 mil laut, serta penamaan pulau-pulau dan pendaftarannya;
2. Pengaturan dan pengendalian ALKI;
3. Meningkatkan pembangunan sistem transportasi multimoda;
4. Melakukan upaya keseimbangan antara transportasi yang berorientasi nasional dengan transportasi yang berorientasi lokal dan kewilayahan;
5. Percepatan pengembangan ekonomi kelautan;
6. Meningkatkan dan mempertahankan kualitas, daya dukung dan kelestarian fungsi lingkungan laut;
7. Meningkatkan harkat dan taraf hidup nelayan serta masyarakat pesisir.
8. Meningkatkan peranan Energi Baru Terbarukan dalam Bauran Energi
9. Fasilitasi pembangunan destinasi pariwisata nasional
10. Pembangunan Industri dan Kelembagaan Pariwisata



## Kinerja Anggaran dan Target Output K/L terkait Industri logistik dan Kemaritiman, 2016



No	Kode BA	K/L	APBNP 2015	RAPBN 2016
		<b>Bidang Industri Logistik</b>	<b>127.262,4</b>	<b>111.708,9</b>
1	033	Kemen PU dan PR	118.546,1	103.812,2
2	090	Kemendag	3.532,1	4.036,6
3	019	Kemenperin	4.548,3	3.339,2
4	065	BKPM	635,9	520,9
		<b>Bidang Kemaritiman</b>	<b>93.038,2</b>	<b>80.498,9</b>
1	022	Kemenhub	64.954,1	50.160,4
2	032	KKP	10.597,8	15.801,2
3	020	Kemen ESDM	15.070,5	8.894,1
4	040	Kemenpar	2.415,8	5.643,3



# Sasaran Pembangunan Bidang Industri Logistik dan Kemaritiman, 2016 (1)



K/L dan sasaran	Rencana 2016	K/L dan sasaran	Rencana 2016
<b>1. Kementerian PU dan PR</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Jalan yang ditingkatkan</li> <li>b. Jalan yang dibangun</li> <li>c. Jembatan yang dibangun</li> <li>d. Jalan bebas hambatan yang dibangun</li> <li>e. Jumlah konstruksi embung dan bangunan penampung air lainnya yang selesai dilaksanakan</li> <li>f. Panjang normalisasi sungai dan pembuatan tanggul yang dibangun/ditingkatkan</li> <li>g. Jumlah konstruksi bendung irigasi</li> <li>h. Jumlah rumah tangga berpenghasilan rendah yang menghuni rumah susun</li> <li>i. Jumlah rumah tangga yang menghuni rumah khusus</li> <li>j. Jumlah Rumah tangga berpenghasilan rendah yang difasilitasi bantuan peningkatan kualitas rumah swadaya</li> </ul>	1.003,9 Km 375,9 Km 6.283,9 m 26,0 Km 228 buah  119 Km  19 buah 15.000 unit  6.350 unit  18.000 unit	<b>1. Kementerian ESDM</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kapasitas terpasang kilang LPG (juta ton)</li> <li>b. Rumah tangga tersambung gas kota (SR)</li> <li>c. Fasilitasi penyelesaian pembangunan pembangkit 35.000 MW</li> <li>d. Rasio Elektrifikasi</li> <li>e. Jumlah kapasitas terpasang PLT Bioenergi</li> <li>f. Jumlah kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi</li> <li>g. Jumlah kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Air</li> <li>h. Jumlah kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Surya</li> <li>i. Jumlah kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Angin</li> </ul>	4,62 121.000 4.212 MW 90,15% 2.069,4 MW 1.712,5 MW 5.534 MW 92,1 MW 11,2 MW
<b>2. Kementerian Perdagangan</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Jumlah UKM yang bermitra dengan retail modern</li> <li>b. Persentase Pertumbuhan Ekspor Produk Olahan Pertanian dan Kehutanan</li> <li>c. Pertumbuhan ekspor non migas (%)</li> <li>d. Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai ketentuan</li> </ul>	150 6%  9,90% 62%	<b>2. Kementerian Kelautan dan Perikanan</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Produksi perikanan tangkap</li> <li>b. Produksi perikanan budidaya</li> <li>c. Volume produk olahan hasil perikanan</li> <li>d. Nilai tukar pembudidaya ikan (NTPi)</li> </ul>	6,45 juta ton 19,46 juta ton 5,9 juta ton 102,25 NTPi
<b>3. Kementerian Perindustrian</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Fasilitasi Pembangunan Bufferstock Bahan Baku Kapas di Jawa Barat dan Bufferstock Kulit di Jawa Timur</li> <li>b. Pengembangan industri petrokimia (komoditi)</li> <li>c. Terfasilitasinya Pengembangan Industri Pangan (komoditi)</li> <li>d. Terevitalisasinya industri galangan kapal di 9 lokasi (Pembangunan/Renovasi, Bantuan Alat, Peningkatan SDM bersertifikasi)</li> <li>e. Jumlah IKM yang dikembangkan produknya (IKM)</li> </ul>	2 lokasi  3 4  9  112	<b>3. Kementerian Perhubungan</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Panjang jalur kereta api yang dibangun</li> <li>b. Jumlah unit jembatan/underpass/flyover KA yang dibangun</li> <li>c. Jumlah BRT</li> <li>d. Jumlah lokasi pembangunan jembatan timbang</li> <li>e. Jumlah paket pembangunan dermaga sungai</li> <li>f. Jumlah pembangunan kapal perintis penumpang dan barang</li> <li>g. Jumlah pembangunan sarana bantu navigasi pelayaran</li> </ul>	110,9 km'sp 27 unit 530 unit 1 lokasi 3 dermaga 94 unit 215 unit
<b>4. BKPM</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Perbaikan kemudahan memulai berusaha</li> <li>b. Jumlah minat investasi</li> <li>c. Jumlah perizinan dan nonperizinan yang diterbitkan</li> <li>d. Penyebaran realisasi investasi di luar jawa</li> </ul>	8 prosedur 6.200 11.800 49,10%	<b>4. Kementerian Pariwisata</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Jumlah fasilitas peningkatan destinasi wisata, budaya, alam dan buatan</li> <li>b. Kontribusi investasi sektor pariwisata terhadap total investasi nasional</li> <li>c. tenaga kerja langsung, tidak langsung, dan ikutan sektor pariwisata (juta orang)</li> <li>d. Jumlah wisatawan mancanegara ke Indonesia (juta orang)</li> <li>e. Jumlah perjalanan wisatawan nusantara (juta perjalanan)</li> <li>f. Jumlah tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi</li> </ul>	25 3,7% 11,7 12 260 25.000



# TERIMA KASIH



# ANGGARAN INFRASTRUKTUR TAHUN 2015-2016

(triliun rupiah)



Uraian	APBNP 2015	RAPBN 2016
<b>I. Infrastruktur Ekonomi</b>	<b>285,1</b>	<b>302,3</b>
<b>1. Melalui K/L</b>	<b>196,4</b>	<b>167,5</b>
033 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	111,1	101,2
022 Kementerian Perhubungan	59,1	47,2
018 Kementerian Pertanian	8,9	6,2
020 Kementerian ESDM	8,1	3,6
<b>2. Melalui Non K/L</b>	<b>11,9</b>	<b>5,1</b>
a.l. 1 VGF (termasuk Cadangan VGF)	1,2	1,1
2 Belanja Hibah	4,5	4,0
<b>3. Melalui Transfer ke Daerah</b>	<b>41,0</b>	<b>79,4</b>
1. Dana Alokasi Khusus	29,7	57,2
2. Tambahan Otonomi Khusus Infrastruktur Prov. Papua & Papua barat	3,0	3,4
3. Perkiraaan Dana Desa (untuk infrastruktur)	8,3	18,8
<b>4. Melalui Pembiayaan</b>	<b>35,7</b>	<b>50,3</b>
a.l. 1. Investasi Pemerintah untuk Infrastruktur	5,1	9,2
2. Penyertaan Modal Negara	28,8	40,2
<b>I. Infrastruktur Sosial</b>	<b>6,5</b>	<b>6,4</b>
023 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	4,4	6,1
025 Kementerian Agama	2,1	0,4
<b>I. Infrastruktur Pendukung</b>	<b>3,9</b>	<b>4,7</b>
056 BPN	1,3	1,6
019 KEMENPERIN	0,6	0,5
<b>Jumlah</b>	<b>295,4</b>	<b>313,4</b>